

PARADIGMA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PADA LPTK

A z h a r

Dosen FKIP Universitas Riau - Pekanbaru

Kinerja Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) harus selalu mengacu pada kualitas yang berkelanjutan, yang dilandasi oleh kreativitas, dan produktivitas. Kualitas bukan saja input, tetapi juga proses dan keluaran. Hal ini dimaksudkan agar keluaran tersebut dapat bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lainnya sehingga cepat terserap oleh pasar kerja. Demi terbentuknya pendidikan yang bermutu di LPTK, diperlukan paradigma baru dalam pelaksanaan pendidikan di LPTK. Hal ini penting karena dibutuhkan LPTK yang memiliki daya saing untuk bersaing menghasilkan kependidikan yang bermutu di dunia pendidikan.

Kata Kunci: Paradigma, mutu pendidikan, LPTK.

A. Pendahuluan

Terminologi yang paling menarik dewasa ini dalam kaitan dengan pendidikan adalah “mutu” atau “kualitas” meningkatkan mutu atau meningkatkan kualitas (Zamroni, 2008:1). Ketatnya persaingan dalam lapangan kerja dewasa ini, menuntut lulusan dari suatu lembaga pendidikan yang bermutu (Rajagukguk, 2009:77). Hal ini merupakan implikasi globalisasi dalam dunia pendidikan yakni adanya deregulasi yang memungkinkan peluang negara asing membuka lembaga pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu persaingan antar lembaga pendidikan dan pasar kerja akan semakin ketat dan berat. Salah satu kritik yang ditujukan pada perguruan tinggi kita di indoensia adalah bahwa sistem dan proses pendidikannya kurang memperhatikan pembentukan keperibadian yang mandiri, kreatif, inovatif dan demokratis.

Sampai sekarang LPTK masih belum mampu mempersiapkan mahasiswa calon guru yang professional. Hali ini ditemukan dilapangan, bahwa mahasiswa calon guru masih menjadi pembicaraan di sekolah tempat mahasiswa praktek mengajar yang dikenal praktek

pengalaman lapangan (PPL). Sebagai contoh kasus, Ketua UPT PPL Universitas Negeri Jakarta Fakhruddin Arbah *dalam* Novenderi (2005: 5) mengaku banyak dapat kritikan dari pihak sekolah tempat mahasiswa praktek pengalaman lapangan (PPL). Menurut Fakhruddin Arbah fenomena yang mesti dibenahi ternyata kualitas mengajar mahasiswa masih rendah, dan sampai sekarang masih banyak mahasiswa yang mengeluhkan kemampuan mengajarnya. Menurut Azhar (2009:2) sebaiknya semua permasalahan ini segera diselesaikan, jangan terus dibiarkan. Hal serupa juga dirasakan oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Oleh karena itu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang memproduksi calon guru jelas tidak terlepas dengan kualitas dan calon guru yang profesional tersebut. Kualitas guru perlu diperhatikan dengan mencermati proses pencetakannya, mulai dari pelayanan oleh tenaga administrasi, dosen pengajar, kurikulum, tempat belajar hingga wawasan mahasiswa terhadap pendidikan, dan sarana penunjang proses belajar mengajar di LPTK.

Pada tulisan ini, penulis ingin memaparkan tentang : (1) paradigma baru pendidikan LPTK, (2) tuntutan mutu pendidikan LPTK, (3) meningkatkan mutu pendidikan LPTK, dan (4) Problema Pendidikan LPTK dewasa ini.

B. Pembahasan

1. Paradigma baru Pendidikan LPTK

Wirakartakusumah dalam Rajagukguk (2009:78) menyatakan bahwa untuk mencapai terselenggaranya pendidikan yang bermutu, diperlukan paradigma baru dalam pendidikan yang difokuskan pada otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi. Sejalan dengan pernyataan diatas, di dalam buku Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke-21 (SPTK-21) yang diterbitkan Depdiknas (2002:54) dinyatakan tuntutan akan mutu dipicu oleh paradigma baru pendidikan tinggi LPTK, yaitu (a) kualitas yang berkelanjutan, (b) otonomi, (c) akuntabilitas, (d) akreditasi dan (e) evaluasi.

Pilar pertama adalah kualitas, kinerja lembaga pendidikan (LPTK) harus selalu mengacu pada kualitas yang berkelanjutan, yang dilandasi oleh kreativitas, dan produktivitas. Kualitas bukan saja input, tetapi juga proses dan keluaran. Hal ini dimaksudkan agar

keluaran tersebut dapat bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lainnya sehingga cepat terserap oleh pasar kerja.

Pilar kedua adalah otonomi perguruan tinggi. Menurut Rajagukguk (2009:78) pengertian otonomi dalam pendidikan belum sepenuhnya mendapat kesepakatan pengertian dan implementasinya, tetapi paling tidak dapat di mengerti sebagai bentuk pendelegasian kewenangan seperti dalam penerimaan dan pengelolaan peserta didik dan staf pengajar/staf non akademik, pengembangan kurikulum, dan materi ajar, serta penentuan standar akademik. Dalam penerapannya di LPTK, misalnya paling tidak bahwa pengajar/dosen semestinya diberikan hak-hak profesi yang mempunyai otoritas di ruang kuliah, dan tidak sebagai bagian kepanjangan tangan birokrasi di atasnya. Sejalan dengan ini Depdiknas (2002:54) menyatakan bahwa di masa yang akan datang peran pemerintah tidak lagi sebagai *provider* (yang harus selalu selalu memberi dan melengkapi) melainkan sebagai fasilitator. Pemerintah secara bertahap akan melimpahkan sebagian besar urusannya kepada lembaga pendidikan (LPTK).

Pilar ketiga adalah akuntabilitas yang sering diterjemahkan menjadi pertanggungjawaban, atau pertanggung-gugatan. Pada masa lalu pertanggung-gugatan terpusat pada pemerintah, sedangkan dengan paradigma baru ini perguruan tinggi harus mempertanggung jawabkan kepada para konstituen atau *stakeholders* yakni pihak-pihak ikut mempertaruhkan kinerja dan produknya kepada perguruan tinggi (Depdiknas, 2002:54). Rajagukguk (2009:78) mengatakan akuntalitas sebagai kemampuan untuk menghasilkan ouput dan outcome yang memuaskan pelanggan. Akuntabilitas menuntut kesepadanan antara tujuan lembaga pendidikan tersebut dengan kenyataan dalam hal norma, etika dan nilai (*values*) termasuk semua program dan kegiatan yang dilaksanakannya. Hal ini memerlukan keterbukaan (transparansi) dari semua pihak yang terlibat dan akuntabilitas untuk penggunaan semua sumber dayanya.

Pilar keempat yaitu akreditasi, yakni pengakuan tentang peringkat suatu perguruan tinggi dibanding dengan perguruan tinggi lain dalam kualitas kinerja maupun keluarannya. Hak masyarakat harus dijamin dan dilindungi untuk memperoleh informasi yang handal dan sah mengenai kualitas penyelenggaraan, kinerja dan hasil/lulusan suatu lembaga perguruan tinggi melalui proses akreditasi terhadap lembaga dan program. Di masa mendatang LPTK harus memiliki status terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang

berkualitas (Depdiknas, 2002:54). Pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh suatu badan independen yang berwenang. Di Indonesia pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Pilar kelima, adalah evaluasi, yang merupakan tindakan manajerial utama yang melandasi pengambilan keputusan. Tanpa evaluasi yang terus menerus oleh lembaga yang bersangkutan tidak akan diperoleh informasi yang berguna untuk memastikan titik berangkat dan titik akhir yang dituju dalam pengembangannya (Depdiknas, 2002:54). Evaluasi bisa dilakukan secara internal atau eksternal. Suatu evaluasi akan lebih bermanfaat bila dilakukan secara berkesinambungan.

2. Tuntutan Mutu Pendidikan LPTK

Mutu adalah suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan berbagai cara dimana setiap defenisi bisa didukung oleh argumentasi yang sama baiknya. Secara luas mutu dapat diartikan sebagai agregat karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan. Dalam pendidikan mutu adalah keberhasilan proses belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan (Rajagukguk, 2009:78)

LPTK sedang memasuki era baru dimana setiap institusi terdapat misi ganda yaitu misi utama mempersiapkan berbagai jenis dan jenjang program pendidikan tenaga kependidikan dan misi kedua yaitu melalui berbagai program non-kependidikan untuk mempersiapkan tenaga profesional di luar profesi kependidikan. Perubahan misi tunggal kepada institusi dengan misi ganda ini banyak menimbulkan permasalahan yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat umum. Apakah LPTK dalam bentuk sekarang memiliki kesanggupan untuk mendidik tenaga kependidikan dengan mutu yang dikehendaki, ataukah LPTK sudah meletakkan tugas utama menjadi tugas biasa sama dengan tugas tambahan untuk mempersiapkan tenaga profesional diluar profesi pendidikan?

Sehubungan dengan pernyataan diatas *H. Mohammad Fakry Gaffar, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (2005: 7)* dalam makalahnya dipaparkan bahwa LPTK swasta yang jumlahnya mendekati 400 institusi yang tersebar diseluruh tanah air memunculkan pertanyaan kualitatif yang cukup merisaukan yaitu :

Pada era globalisasi, masyarakat semakin paham akan hak-haknya karena masyarakat sadar bahwa lembaga tersebut telah menggunakan fasilitas negara yang berasal dari rakyat. Mereka menuntut agar sekolah-sekolah mempertanggungjawabkan kinerjanya. Masyarakat juga menuntut LPTK untuk mempertanggungjawabkan mutu guru dan tenaga kependidikan yang dihasilkan (Depdiknas, 2002:53).

Problema mutu yang ada pada perbedaan kualitas karena model pengadaan tenaga kependidikan yang dilaksanakan oleh berbagai LPTK tidak memiliki sistem dan prosedur pengendalian mutu yang handal. Akibatnya standar kelulusan beragam pula. Banyak guru dan tenaga kependidikan yang dihasilkan tetapi kualitasnya cenderung bervariasi karena belum ada standar yang digunakan untuk mengukur kualitas lulusan. Karena itu kebutuhan akan ditetapkannya standar sebagai upaya memenuhi tuntutan akan mutu sangat penting di masa-masa yang akan datang

3. Meningkatkan Mutu Pendidikan LPTK

LPTK merupakan salah satu kunci utama berhasil atau tidaknya gerakan pendidikan dalam rangka memenuhi standar mutu, baik standar produk dan pelayanan maupun standar kustomer pendidikan pada umumnya. Menurut Jiyono (1994) dalam Danim (2002:34) bahwa mutu pendidikan pendidikan umumnya diartikan sebagai gambaran keberhasilan pendidikan dalam mengubah tingkah laku anak didik/mahasiswa yang dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional

Nurulpaik (2005:3) berpendapat kalau kita sepakat bahwa calon tenaga kependidikan harus dipersipkan secara professional dalam satu setting pengkondisian tertentu, maka lingkungan pendidikan harus didesain dan disiapkan sedemikian rupa sehingga mampu membentuk karakter yang diharapkan. Menurut *H. Mohammad Fakry Gaffar* (2005:3-4) bahwa LPTK memiliki tugas pokok untuk mendidik calon-calon guru TK hingga perguruan tinggi. Untuk dapat diberikan tugas penting tersebut maka LPTK itu harus dinilai apakah telah memenuhi standard kelayakan sebagai sebuah LPTK yang bermutu dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut. Untuk menentukan kelayakan secara kelembagaan itu maka standard kelembagaan digunakan sebagai tolok ukur dalam proses evaluasi kelembagaan tersebut. Lembaga yang telah meyakinkan

memenuhi standard tersebut disebut lembaga yang terakreditasi atau *accredited in teacher education institution*.

Selanjutnya Slamet (1999) sebagaimana yang dikutip Rajagukguk (2009:79) mengatakan bahwa untuk bisa menghasilkan mutu, terdapat empat usaha mendasar yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan, yaitu :

- a. Menciptakan situasi "menang-menang" (*win-win solution*) dan bukan situasi "kalah-menang" diantara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (*stakeholder*). Dalam hal ini terutama antara pimpinan lembaga dengan staf lembaga harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu produk/jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan.
- b. Perlu dikembangkan motivasi instrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu. Setiap orang dalam lembaga pendidikan harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya mencapai mutu tertentu yang meningkat terus menerus, terutama sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna.
- c. Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan bukanlah suatu proses perubahan jangka pendek, tetapi usaha jangka panjang yang konsisten dan berkesinambungan.
- d. Dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, haruslah dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu. Janganlah diantara mereka terjadi persaingan yang mengganggu proses mencapai hasil mutu tersebut. Mereka adalah satu kesatuan yang harus bekerjasama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk menghasilkan mutu sesuai yang diharapkan.

Selanjutnya Rajagukguk (2009:80) memaparkan bahwa dalam kerangka manajemen pengembangan mutu terpadu, usaha pendidikan tidak lain adalah merupakan usaha "jasa" yang memberikan pelayanan kepada pelanggannya yang utamanya yaitu kepada mereka yang belajar dalam lembaga pendidikan tersebut. Menurut Sallis (1993) dalam Rajagukguk (2009:80) bahwa para pelanggan layanan pendidikan dapat terdiri dari berbagai unsur, paling tidak empat kelompok.

- a. Kelompok pertama, adalah mereka yang belajar, bisa merupakan mahasiswa/pelajar/peserta belajar yang biasa disebut

klien/pelanggan primer (*primary external customers*). Mereka inilah yang langsung menerima manfaat layanan pendidikan dari lembaga pendidikan.

- b. Kedua, para klien terkait dengan orang yang mengirimnya ke lembaga pendidikan, yaitu orang tua atau lembaga tempat klien tersebut bekerja, dan mereka ini kita sebut sebagai pelanggan sekunder (*secondary external customers*).
- c. Ketiga, pelanggan yang bersifat tersier adalah lapangan kerja, bisa pemerintah maupun masyarakat pengguna output pendidikan (*tertiary external customers*).
- d. Keempat, dalam hubungan kelembagaan masih terdapat pelanggan lainnya yaitu berasal dari intern lembaga, mereka adalah para dosen/tutor dan tenaga administrasi pendidikan, serta pimpinan lembaga pendidikan (*internal customers*)

Lebih lanjut Karsidi (2000) sebagaimana yang dikutip Rajagukguk (2009:80) mengatakan walaupun para dosen/tutor dan tenaga administrasi, serta pimpinan lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam proses layanan jasa, tetapi mereka termasuk juga pelanggan jira dilihat dari hubungan manajemen. Mereka berkepentingan dengan lembaga tersebut untuk maju, karena semakin maju dan berkualitas dari suatu lembaga pendidikan (LPTK) mereka akan diuntungkan, baik kebanggaan maupun finansial. Jadi dapat dikatakan bahwa program peningkatan mutu pendidikan harus berorientasi kepada kebutuhan/harapan pelanggan. Maka layanan pendidikan suatu lembaga pendidikan haruslah memperhatikan kebutuhan dan harapan masing-masing pelanggan yang diuraikan diatas.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Guru (PPTG) dan Pendidikan Tenaga Kependidikan (PTK). Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Guru (PPTG) dan Pendidikan Tenaga Kependidikan pada umumnya dimaksudkan agar guru mampu merespon perubahan dan tuntutan perkembangan iptek dan kemajuan kemasyarakatan, termasuk perubahan sistem pendidikan dan pembelajaran secara mikro. Kegiatan PPTG secara filosofis merupakan inti dari profesionalisasi..

Dalam hal ini LPTK merupakan salah satu kunci utama berhasil atau tidaknya gerakan pendidikan dalam rangka memenuhi standar mutu, baik standar produk dan pelayanan maupun standar

kustomer pendidikan pada umumnya. Mutu pendidikan pendidikan umumnya diartikan sebagai gambaran keberhasilan pendidikan dalam mengubah tingkah laku anak didik/mahasiswa yang dikaitkan dengan tujuan pendidikan.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi perlu memiliki standar mutu lulusan yang perlu diupayakan untuk dicapai. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan perlunya suatu standar nasional pendidikan yang mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan (pasal.35 ayat 1). Standar nasional pendidikan ini harus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan pendidikan dan pembiayaannya. Dalam pelaksanaan pendidikan minimal mempunyai 5 komponen utama yaitu filsafat dan tujuan pendidikan, peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan

Selanjutnya untuk menghasilkan guru-guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar nasional, dibutuhkan LPTK yang memiliki daya saing yang dapat menawarkan hasil-hasil kependidikan yang berkualitas, memiliki otonomi yang luas untuk menentukan arah pengembangan selanjutnya, dan sehat organisasinya. Dalam hubungan ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menerbitkan dokumen kebijakan jangka panjang yang disebut Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (*Higher Education Long Term Strategy—HELTS—2003-2010*) yang menegaskan tiga kebijakan dasar dalam strategi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan tinggi, yaitu: (1) Peningkatan Daya Saing Bangsa, (2), Otonomi, dan (3) Kesehatan Organisasi.

Agar tercapainya mutu yang diharapkan, maka pendidikan di LPTK haruslah kondusif. Dalam hal ini Azhar (2006:29) menyatakan untuk menciptakan pendidikan yang kondusif dalam meningkatkan mutu lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, maka pendidikan di LPTK haruslah memperhatikan (1) Orientasi kurikulum, (2) Proses Pembelajaran, (3) Pelaksanaan PPL (Praktek Pengalaman Lapangan), (4) Tenaga Dosen / staf akademik, (5) Sarana dan Prasarana dan (6) Pengembangan Manajemen Kelembagaan.

4. Problema Pendidikan LPTK Dewasa ini

Kalau kita perhatikan input mahasiswa LPTK ternyata masukan mahasiswanya adalah mereka yang mutunya memang rendah. Selain itu, LPTK tidak banyak diminati oleh lulusan sekolah menengah, hal ini terlihat dari LPTK merupakan pilihan akhir setelah tidak diterima di program studi non kependidikan. Hal ini dipertegas oleh suyono (2005) mengatakan bahwa mutu guru rendah, karena gaji guru rendah, generasi yang tertarik menjadi calon guru umumnya bukan calon-calon terbaik. Calon-calon terbaik akan bersekolah disekolah lanjutan tingkat atas favorit atau kuliah di jurusan favorit, misalnya kedokteran, teknik, hubungan internasional atau lainnya. Lulusan non kependidikan yang kemudian tertarik menjadi guru dengan mengambil program akta mengajar dapat dipasikan juga bukan lulusan terbaik. Mereka umumnya mengambil program akta mengajar karena kesulitan mencari pekerjaan diluar profesi guru.

Berdasarkan kenyataan, ternyata tidak banyak mahasiswa yang masuk LPTK karena memang ingin menjadi guru. Menurut Nurhatati Fuad dalam Antoro (2005: 6) bahwa orang yang masuk ke LPTK banyak yang tidak didasarkan motivasi murni ingin jadi guru, tetapi alternatif karena yang diinginkannya tidak tercapai. Sekitar 50 % mahasiswa memilih Lembaga Akta Mengajar karena sudah merasa mentok kerja dibidang lain. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dapat dihasilkan guru yang bermutu bila awalnya memang tidak ada motivasi untuk menjadi guru LPTK sekarang tidak lagi memenuhi kebutuhan untuk menyediakan guru yang profesional akibat masukan yang kurang bermutu (Kintamani, 2002: 53).

LPTK merupakan lembaga yang tertinggal oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tambahan pula, LPTK tidak memiliki metode dalam menguji teori, tidak ada keseimbangan antara penguasaan sains dan psikologi, perkembangan peserta didik, dan proses belajar mengajar (Kintamani, 2002: 53). LPTK hanya menekankan penguasaan metodologi pembelajaran tanpa memperhatikan penguasaan keilmuan calon guru. (Antoro, 2005 : 2). Jadi Kurikulum yang diterapkan di LPTK belum relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dalam tahun belakangan ini terus berubah. Hal ini diperkuat oleh Paat (2005: 12) bahwa dilihat dari isi kurikulum kependidikan di LPTK dan interaksi di kelas , hanya memproduksi guru sebagai tukang dan otoriter.

Kekurangan LPTK lainnya adalah jurusan atau program studi di LPTK belum mempertimbangkan kebutuhan guru yang diperlukan oleh sekolah baik secara nasional maupun propinsi. Selain itu, belum ada sinkronisasi antara LPTK dengan Depdiknas yang berperan sebagai distributor sekaligus user. LPTK seharusnya memiliki program yang lengkap dalam paket yang lebih menarik yaitu kurikulum yang kompeten dengan bekal aspek psikologi, pedagogi/ilmu pendidikan yang merupakan modal dasar bagi calon guru (Media Indoensia, 6 Juni 2002).

Suparno (2005: 1) memaparkan pendapat Prof Djohar MS dan Prof Winarno Surakhmad yang mengungkapkan, mutu pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dikhawatirkan terus merosot akibat lemahnya pembekalan nilai profesional pada calon guru selama pendidikan di perguruan tinggi. Semula dengan diubahnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas nilai profesionalisme akan meningkat, ternyata tidak. Suparno (2005:1) memaparkan bahwa kebanyakan fakultas keguruan "*school of education*" tidak siap menghasilkan guru yang profesional. Lulusannya tidak sungguh menguasai bahan ajar dan tidak menguasai cara mengajar di kelas.

Faktor penyebab lain, calon guru tidak siap dengan pengajaran. Salah satu alasan pokok adalah praktik mengajar (PPL) di banyak IKIP atau universitas pendidikan kurang mendapat tekanan serius. PPL hanya semacam formalitas memenuhi sarat lulus. Bagaimana seorang mahasiswa sungguh profesional mengajar bila praktik mengajarnya saja hanya lima kali dan itu pun masih dapat diperpendek lagi? Banyak sekolah yang bermutu tidak mau digunakan sebagai tempat praktik karena merasa proses pembelajarannya diganggu guru praktik. Akibatnya, guru kelas hanya memberi waktu sedikit bagi mahasiswa untuk praktik mengajar. Anehnya banyak mahasiswa senang bila tidak harus praktik. Maka jelas, mengapa mereka tidak profesional dalam mengajar. Kalau memang mutu pengajaran mau ditingkatkan, praktik mengajar harus ditekankan. Mahasiswa harus lebih diberikan kesempatan praktik di sekolah. Barangkali perlu satu tahun agar minat menjadi guru muncul dan praktiknya sungguh-sungguh. Dalam hal praktik mengajar di sekolah, banyak dosen pembimbing praktik juga tidak serius, tidak banyak mendampingi mahasiswa dan hanya mempercayakan kepada guru sekolah (Suparno, 2005).

Dari sisi kesejahteraan, profesi dosen juga masih banyak yang belum mendapatkan penghasilan sebagaimana yang diharapkan dengan status sosial yang tinggi dimasyarakat. Fakta ini didukung dengan masih ditemukannya penghasilan seorang dosen dengan jumlah penghasilan dibawah Upah Minimum Propinsi (UMP), sungguh sangat tragis dan memprihatinkan. Maka timbullah pertanyaan mendasar : Mungkinkah dosen dapat profesional dengan kesejahteraan yang minim?, lantas bagaimana pula pendidikan tinggi dapat berkualitas jika dosen dosen yang menjalankan tugasnya diperguruan tinggi tidak profesional? suatu kenyataan pahit bagi potret buruk pendidikan tinggi kita. Jika dibandingkan dengan negara serumpun Malaysia sangat mengagumkan penghasilan dosen yang mendapatkan kesejahteraan jauh lebih baik serta apresiasi tinggi dimasyarakat.

Disamping itu di LPTK belum terciptanya pelayanan yang baik dan maksimal dalam proses pencetakan calon guru, mulai dari pelayanan oleh tenaga administrasi, dosen pengajar, kurikulum, tempat belajar dan sarana penunjang lainnya (Novendri, 2005: 5).

C. Penutup

Dari tulisan diatas dapat disimpulkan beberapa hal yang berhubungan dengan paradigma meningkatkan mutu pendidikan di LPTK dewasa ini dalam mencetak tenaga guru yang profesional sebagai berikut: (1) paradigma baru pendidikan tinggi LPTK, yaitu (a) kualitas yang berkelanjutan, (b) otonomi, (c) akuntabilitas, (d) akreditasi dan (e) evaluasi pelaksanaan pendidikan. (2) Secara luas mutu dapat diartikan sebagai agregat karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan. Dalam pendidikan mutu adalah suatu keberhasilan proses belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan, (3) Dewasa ini LPTK sangat banyak jumlahnya LPTK swasta jumlahnya mendekati 400 institusi yang tersebar diseluruh tanah air. Untuk itu pimpinan LPTK itu sendiri baik swasta maupun negeri, harus bertanggungjawab secara profesional dan menyeluruh, maka evaluasi menyeluruh dengan standarisasi LPTK disertai dengan upaya, kesadaran dan komitmen tinggi untuk menerapkannya dan bertanggung jawab atas berbagai implikasinya merupakan jawaban yang memerlukan upaya sungguh-sungguh dari semua pihak.

Untuk menciptakan pendidikan yang kondusif dalam meningkatkan mutu lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, maka pendidikan di LPTK haruslah memperhatikan (1) Orientasi kurikulum, (2) Proses Pembelajaran, (3) Pelaksanaan PPL (Praktek Pengalaman Lapangan), (4) Tenaga Dosen / staf akademik, (5) Sarana dan Prasarana dan (6) Pengembangan Manajemen Kelembagaan.

Daftar Pustaka

- Antoro, Billy. 2005. Meninjau Ulang kurikulum LPTK. *Majalah Transformasi*, ed. 37/Feb. 2005. Jakarta: Lembaga Pers UNJ
- Antoro, Billy. 2005. LAM Cambuk Peningkatan Kualitas LPTK. *Majalah Transformasi*, ed. 37/Feb 2005. Jakarta: Lembaga Pers UNJ.
- Azhar. 2009. Kondisi LPTK Sebagai Pencetak Guru Yang Profesional. *Tabularasa-Jurnal Pendidikan PPs Unimed*, Vol. 06 No.1 Juni 2009. pp (1-13)
- Danim, Sudarwan. 2002. *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Depdiknas. 2002. *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke-21 (SPTK-21)*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2005. *Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Fakry Gaffar, Mohammad. *Standarisasi dan Pengembangan Mutu Pendidikan- Makalah disampaikan pada Pertemuan FIP/JIP seluruh Indonesia di Bukaittinggi 12-14 September 2005*.
- Nurulpaik, Iik. Ke Mana Arah Pengembangan LPTK? *Pikiran Rakyat Cyber Media* (Kamis 02 June 2005)
- Kintamani, Ida. 2002. *Guru dan Dinamikanya: Selintas Pendidikan Indonesia di akhir 2002*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Media Indonesia. *Mislink Produk LPTK-Depdiknas*. 6 Juni 2002.

- Novendri, Herman. *UNJ Menyiapkan Guru, sudah serius ?* Majalah Transformasi, edisi 37/Februari 2005. Lembaga Pers UNJ : Jakarta . 2005
- Paat, Lody . *Guru Sebagai Intelektual Transformatif.* Majalah Transformasi, edisi 37/Februari 2005. Lembaga Pers UNJ : Jakarta . 2005.
- Pusat Informatika. Hasil Proyeksi Guru SD, SLTP, dan SMU tahun 1966/1997-2018/2019. Jakarta : 1999.
- Rajagukguk, Bresman. *Paradigma Baru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.* Tabularasa-Jurnal Pendidikan PPs Unimed , Volume 06 No.1 Juni 2009.pp (77-78)
- Suparno, Paul .*Calon Guru Tidak Profesional?* <http://www.defdiknas.go.id/sikep/issue/sentral/F31>. Jumat 18 Feb 2005.
- Sisdiknas. *Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.* Fokusmedia: Bandung. 2003.
- Zamroni. *Guru dan Peningkatan Mutu.* Makalah disampaikan pada seminar strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan yang diselenggarakan oleh PPs UNY tanggal 21-23 Maret 2008.